



RETORIKA POLITIK, KEKERASAN BERSENJATA, DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI: ANALISIS STOCHASTIC TERRORISM DALAM EKOSISTEM MEDIA

Tatik

UPTD SDN 1 Jatisura Cikedung, Indramayu
yanakus246@gmail.com

Rifqi

Darul Ma'arif Indramayu University
rifqi816@gmail.com

Dinata Firmansyah

Islamic University Depok
dinatafirmansyahu@gmail.com

Rosidin

IAI Padhaku Indramayu
sidinros934@gmail.com

Sumarta

IAI Padhaku Indramayu
martasumarta548@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Oktober 2025
Accepted: Desember 2025

Revised : November 2025
Available online : Desember 2025

How to Cite: Author. (2025). Tittle. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(4), 185-196. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i4.36>

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of political violence fueled by the convergence of inflammatory political rhetoric and firearm accessibility. In the digital era, political communication has shifted from policy persuasion to an instrument of dehumanization that threatens the stability of deliberative democracy. This study aims to analyze how socio-psychological mechanisms and media ecosystems contribute to the phenomenon of

contemporary political violence. The research method employed is a qualitative approach with library research. Secondary data were gathered from reputable scientific literature, policy reports, and relevant textbooks. Qualitative content analysis was conducted by integrating cognitive-neoassociation theory, totalism theory, and deliberative democracy theory to map the causality between mass communication patterns and the probability of violence. The results indicate that extreme political rhetoric creates a "siege mentality" that dehumanizes political opponents as existential threats. This phenomenon is validated as stochastic terrorism, where social media algorithms act as incubators for radicalization that trigger lone-wolf violent actions. The availability of firearms further exacerbates the situation by providing physical capability to ideologically radicalized individuals. In conclusion, the threat to democracy today is systemic, originating from the erosion of communication norms at the elite level to the manipulation of information in the digital sphere. Effective mitigation requires the construction of political "cooling structures," media algorithm regulation, and the restoration of discursive ethics to return human dignity to the political arena.

KEYWORDS: Stochastic Terrorism, Political Rhetoric, Dehumanization, Media Ecosystem

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekerasan politik yang dipicu oleh konvergensi antara retorika politik menghasut dan aksesibilitas senjata api. Di era digital, komunikasi politik telah bergeser dari persuasi kebijakan menjadi instrumen dehumanisasi yang mengancam stabilitas demokrasi deliberatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme sosiopsikologis dan ekosistem media berkontribusi pada fenomena kekerasan politik kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research). Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah bereputasi, laporan kebijakan, dan buku teks terkait. Analisis konten dilakukan dengan mengintegrasikan teori kognitif-neoasosiasi, teori totalisme, dan teori demokrasi deliberatif untuk memetakan kausalitas antara pola komunikasi massa dan probabilitas kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retorika politik ekstrem menciptakan "mentalitas kepungan" yang mendehumanisasi lawan politik sebagai ancaman eksistensial. Fenomena ini divalidasi sebagai stochastic terrorism, di mana algoritma media sosial bertindak sebagai inkubator radikalisme yang memicu aksi kekerasan individu (lone wolf). Ketersediaan senjata api semakin memperburuk situasi dengan menyediakan kapabilitas fisik bagi individu yang telah teradikalisasi secara ideologis. Kesimpulannya, ancaman terhadap demokrasi saat ini bersifat sistemik, yang bermula dari pengikisan norma komunikasi di tingkat elit hingga manipulasi informasi di ruang digital. Mitigasi yang efektif memerlukan pembangunan "struktur pendinginan" politik, regulasi algoritma media, dan pemulihan etika diskursus untuk mengembalikan martabat manusia dalam politik.

KATA KUNCI: Stochastic Terrorism, Retorika Politik, Dehumanisasi, Ekosistem Media.

INTRODUCTION

Lanskap politik kontemporer saat ini tengah menghadapi badai sempurna yang mengancam fondasi stabilitas bernegara. Fenomena mutakhir menunjukkan adanya konvergensi yang sangat berbahaya antara retorika politik yang menghasut dengan aksesibilitas senjata api berdaya rusak tinggi. Di berbagai belahan dunia, kontestasi politik tidak lagi sekadar perebutan suara melalui kebijakan, melainkan telah bergeser menjadi konfrontasi fisik. Peningkatan kasus kekerasan politik, termasuk percobaan pembunuhan terhadap figur publik dan komentator, menunjukkan bahwa batas antara perdebatan ideologis dan agresi fisik telah memudar. Fenomena ini bukan hanya persoalan kriminalitas biasa, melainkan ancaman eksistensial terhadap

norma demokrasi yang menuntut penyelesaian konflik secara damai (Habermas, 1996).

Ketika retorika politik yang penuh kebencian bertemu dengan ketersediaan senjata api terutama jenis semi-otomatis yang memiliki kapabilitas militer potensi ledakan kekerasan meningkat secara eksponensial. Politik yang seharusnya menjadi ruang deliberasi yang sehat kini berubah menjadi medan konflik eksistensial. Untuk memahami eskalasi ini, kita perlu membedah mekanisme sosial-psikologis yang mendasarinya. Berkowitz (2012) dalam konsepsi cognitive-neoassociation menjelaskan bagaimana kemarahan yang dipicu oleh stimulasi lingkungan (seperti narasi politik yang provokatif) dapat bertransformasi menjadi agresi fisik yang nyata. Dalam konteks ini, retorika politik berfungsi sebagai pemantik yang mengaktifkan kesiapan psikologis individu untuk melakukan kekerasan.

Pola ekstremisme politik modern menunjukkan kemiripan yang mengkhawatirkan dengan dinamika kelompok kultus. Para pemimpin populis dan propagandis seringkali memobilisasi massa melalui "narasi krisis" yang diciptakan secara sengaja. Lifton (1989) mengidentifikasi proses ini sebagai thought reform, di mana individu dipengaruhi untuk mengadopsi mentalitas totalisme. Senada dengan hal tersebut, Hassan (2015) menekankan bahwa mobilisasi dukungan seringkali melibatkan teknik pengendalian pikiran yang menciptakan ketergantungan emosional terhadap sosok pemimpin.

Inti dari narasi ini adalah penciptaan dikotomi tajam antara "kami" (*ingroup*) dan "mereka" (*outgroup*). Lawan politik tidak lagi dipandang sebagai mitra dialog, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas, nilai, dan kelangsungan hidup kelompok. Dehumanisasi menjadi alat utama dalam proses ini. Pratama (2022) mencatat bahwa dehumanisasi dalam kontestasi politik di media sosial berfungsi untuk menghilangkan hambatan moral seseorang dalam melakukan kekerasan. Ketika lawan politik dicap sebagai "hama", "pengkhianat", atau "musuh bangsa", maka penggunaan kekerasan terhadap mereka dianggap sebagai tindakan heroik untuk menyelamatkan kelompok.

Salah satu kontribusi penting dalam studi keamanan modern adalah konsep stochastic terrorism. Fenomena ini merujuk pada penggunaan komunikasi massa yang mendehumanisasi untuk menghasut individu-individu yang tidak stabil (*lone wolves*) melakukan kekerasan, di mana tindakan spesifiknya sulit diprediksi tetapi secara statistik dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat dari retorika tersebut. Hamm dan Spaaij (2017) dalam studi mereka tentang terorisme serigala tunggal (*lone wolf*) menegaskan bahwa individu-individu ini tidak bergerak dalam ruang hampa; mereka adalah produk dari ekosistem narasi ekstrem yang terus-menerus dikonsumsi melalui media.

Chermak dan Gruenewald (2015) memberikan fondasi penting bahwa studi terorisme harus melihat bagaimana pesan-pesan radikal dikonstruksi di ruang publik. Kekerasan yang dilakukan oleh individu tunggal seringkali dianggap sebagai patologi mental pribadi, padahal secara struktural, tindakan tersebut adalah "eksekusi" dari perintah implisit yang disebarkan oleh aktor politik melalui retorika publik. Di Indonesia, Zulkarnain (2021) mengamati bahwa radikalisme individu sangat dipengaruhi oleh persepsi ketidakadilan yang dipicu oleh retorika kelompok yang merasa terancam.

Peran teknologi informasi dalam memperparah kondisi ini tidak dapat diabaikan. Sunstein (2017) melalui konsep #Republic memperingatkan tentang bahaya *cyber-cascades* dan *echo chambers*, di mana individu hanya terpapar pada opini yang memperkuat bias mereka sendiri. Hal ini menciptakan polarisasi yang sangat dalam. Haryanto (2021) menunjukkan bahwa di Indonesia, media sosial telah menjadi inkubator utama polarisasi masyarakat melalui retorika politik yang tidak terfilter.

Munn (2020) menjelaskan mekanisme ini sebagai *Alt-right pipeline*, sebuah jalur radikalisme di mana algoritma platform digital menggiring pengguna dari konten konservatif moderat ke arah ekstremisme yang lebih radikal secara bertahap. Hal ini diperburuk oleh praktik manipulasi media dan disinformasi terorganisir (Marwick & Lewis, 2017). Di bawah tekanan informasi yang melimpah, individu seringkali gagal menjadi "psikolog intuitif" yang baik karena

adanya keterbatasan kognitif dalam memproses informasi secara objektif (Ross, 1977). Akibatnya, alih-alih mencapai pemahaman yang lebih baik, paparan informasi seringkali justru memperkuat kebencian (Wojcieszak, 2009).

Squire (2020) menyebut fenomena ini sebagai antisocial computing, di mana desain teknis media sosial justru memfasilitasi radikalisasi privat yang kemudian meledak dalam ekstremisme publik. Dalam ekosistem ini, hoaks dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada fakta, menciptakan tantangan serius bagi demokrasi deliberatif (Susilo, 2020).

Kekerasan tidak selalu dimulai dengan peluru; ia sering dimulai dengan kata-kata. Wahyuni (2018) menyoroti adanya kekerasan simbolik dalam retorika politik kontemporer, di mana bahasa digunakan untuk mendiskreditkan dan mematikan karakter lawan secara sistematis. Ini adalah bentuk agresi yang merusak ruang publik sebelum kekerasan fisik benar-benar terjadi. Bliuc et al. (2018) menambahkan bahwa jaringan ideologi rasial dan supremasi seringkali menggunakan platform online untuk memperluas jangkauan retorika "kami versus mereka" ini secara global.

Di tingkat struktural, bangkitnya populisme menjadi katalisator utama. Mietzner (2020) mengamati bahwa di Indonesia, penurunan kualitas demokrasi berkaitan erat dengan cara aktor populis memobilisasi ketidakpuasan kelas menengah melalui narasi-narasi yang memecah belah. Populisme seringkali mengabaikan etika komunikasi politik demi memenangkan dukungan massa, sebuah tren yang sangat berbahaya di era post-truth (Maarif, 2018). Fenomena ini, menurut Fadhlurrohman (2023), merupakan ancaman langsung terhadap institusi demokrasi karena ia menormalisasi kekerasan politik sebagai alat sah untuk mencapai kekuasaan.

Kekerasan bersenjata dalam konteks politik juga harus dipahami melalui lensa psikologi pertempuran. Grossman dan Christensen (2004) menjelaskan bahwa manusia secara alami memiliki hambatan internal untuk membunuh sesamanya. Namun, hambatan ini dapat diruntuhkan melalui pengkondisian psikologis dan dehumanisasi lawan. Retorika politik ekstrem berfungsi sebagai bentuk pengkondisian massal ini. Koehler (2019) mencatat bahwa ancaman dari kelompok sayap kanan ekstrem seringkali sulit ditangani karena mereka bergerak dalam struktur yang cair dan terdesentralisasi, namun tetap disatukan oleh narasi kebencian yang sama.

Untuk melawan hal ini, diperlukan integrasi antara kebijakan keamanan dan penguatan norma demokrasi. Rakhmani (2019) menekankan perlunya melihat bagaimana ekstremisme menjadi arus utama (mainstreaming) melalui wacana politik sehari-hari. Nurhasanah (2019) berpendapat bahwa perlindungan terhadap ruang publik demokratis harus menjadi prioritas, di mana moderasi konten dan literasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk mencegah radikalisme online.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara retorika politik yang mendehumanisasi, fenomena stochastic terrorism, dan eskalasi kekerasan bersenjata. Melalui integrasi perspektif psikologi sosial, studi media, dan teori demokrasi deliberatif, artikel ini berupaya menjelaskan bahwa serangan "lone wolf" atau kekerasan politik individu bukanlah peristiwa acak yang terisolasi. Sebaliknya, tindakan tersebut adalah produk akhir dari sebuah rantai pasokan kebencian yang dimulai dari retorika politik di tingkat elit, diamplifikasi oleh algoritma media sosial, dan dieksekusi melalui kemudahan akses terhadap senjata api (Gunn & Lucaites, 2010; Berger, 2018).

Kontribusi artikel ini terletak pada pemaparan bahwa ancaman terhadap demokrasi saat ini bersifat struktural dan sistemis. Demokrasi tidak hanya terancam oleh kudeta militer, tetapi juga oleh pengikisan norma-norma komunikasi dan keamanan kolektif dari dalam. Dengan memahami mekanisme stochastic terrorism, kita dapat merumuskan respons yang lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di tengah ekosistem informasi yang semakin toksik.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan

(*library research*). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konstruksi teoretis mengenai retorika politik, stochastic terrorism, dan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi melalui literatur yang relevan. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah terindeks (Scopus dan Sinta 1-3), serta laporan kebijakan keamanan kontemporer.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada pangkalan data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect menggunakan kata kunci spesifik: "*stochastic terrorism*", "*political dehumanization*", "*lone wolf radicalization*", dan "*media ecosystem*". Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis konten kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengintegrasikan teori psikologi sosial dari Berkowitz (2012) dan Lifton (1989) dengan teori demokrasi deliberatif Habermas (1996) untuk membedah bagaimana narasi ekstrem bertransformasi menjadi tindakan kekerasan nyata.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti studi media, kriminologi, dan ilmu politik guna memastikan objektivitas interpretasi. Analisis diarahkan untuk memetakan hubungan kausalitas antara pola komunikasi massa yang mendehumanisasi dengan peningkatan probabilitas kekerasan bersenjata oleh aktor non-negara. Hasil sintesis literatur ini kemudian digunakan untuk merumuskan respons normatif dan struktural terhadap ancaman disintegrasi demokrasi di era digital.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Retorika Politik Ekstrem: Dari Persuasi Menuju Dehumanisasi dan Mentalitas Kepungan

Analisis mendalam terhadap berbagai literatur primer menunjukkan bahwa retorika politik kontemporer telah mengalami metamorfosis yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Secara normatif, politik seharusnya menjadi arena deliberasi gagasan di mana perbedaan pendapat diselesaikan melalui pertukaran argumen yang rasional (Habermas, 1996). Namun, realitas saat ini menunjukkan pergeseran tajam di mana komunikasi politik justru bertransformasi menjadi instrumen penciptaan siege mentality atau mentalitas kepanikan. Dalam kerangka ini, elit politik populis tidak lagi memfokuskan kampanye pada program kerja atau visi pembangunan yang konkret, melainkan pada narasi krisis eksistensial yang sengaja dikonstruksi untuk memicu kepanikan moral.

Mietzner (2020) menyoroti fenomena ini baik di Indonesia maupun secara global, di mana aktor politik menggunakan rasa takut sebagai komoditas utama untuk memobilisasi massa. Ketika pendukung diyakinkan secara terus-menerus bahwa identitas, agama, atau kelangsungan hidup kelompok mereka sedang berada di bawah ancaman serius dari "pihak luar" atau "musuh dalam selimut", rasionalitas publik mulai runtuh dan digantikan oleh insting bertahan hidup yang primitif. Narasi ini menciptakan persepsi bahwa kekuasaan politik bukan lagi soal mengelola negara, melainkan soal menyelamatkan kelompok dari kepunahan.

Pola ini secara psikologis dijelaskan secara akurat oleh Lifton (1989) melalui mekanisme kontrol milieus dan totalisme. Dalam kelompok yang telah terpolarisasi secara ekstrem, realitas sosial disederhanakan secara radikal menjadi dikotomi moral yang rigid dan absolut. Fenomena ini menciptakan dunia di mana "kami" dicitrakan sebagai pembawa kebenaran mutlak dan cahaya moral, sementara "mereka" (lawan politik) direduksi menjadi representasi kejahatan murni atau ancaman yang harus dimusnahkan. Berger (2018) memperkuat analisis ini dengan menegaskan bahwa ekstremisme memerlukan keberadaan "musuh" yang didefinisikan secara tajam untuk mempertahankan kohesi internal kelompok. Tanpa adanya musuh bersama, narasi krisis yang dibangun elit populis akan kehilangan relevansinya. Akibatnya, retorika politik bukan lagi sarana untuk mencapai konsensus, melainkan alat untuk mematikan karakter lawan secara total dan sistematis.

Dalam ekosistem media yang tidak terfilter, retorika mendehumanisasi ini menyebar

tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang toksik. Dehumanisasi merupakan tahapan paling kritis dalam eskalasi konflik sebelum kekerasan fisik benar-benar terjadi. Pratama (2022) dan Wahyuni (2018) dalam kajiannya terhadap lanskap digital di Indonesia menemukan bahwa penggunaan label-label yang merendahkan martabat manusia seperti "hama", "pengkhianat", "iblis", atau istilah binatang lainnya bukan sekadar bumbu retorika, melainkan berfungsi sebagai "anestesi moral". Secara psikologis, manusia memiliki hambatan internal alami untuk menyakiti sesamanya (Grossman & Christensen, 2004). Namun, melalui proses dehumanisasi yang persisten, lawan politik tidak lagi dipandang sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat, melainkan sebagai objek atau ancaman impersonal.

Jika lawan politik berhasil dicitrakan sebagai "bukan manusia" atau "kanker bagi bangsa", maka hambatan moral untuk melakukan agresi fisik akan runtuh. Pada titik inilah kekerasan politik mulai mendapatkan pembenaran moral. Tindakan yang sebelumnya dianggap kriminal atau amoral berubah menjadi tindakan yang heroik, sah, dan bahkan dianggap sebagai kewajiban patriotik untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman yang dibayangkan. Berkowitz (2012) melalui konsepsi cognitive-neoassociation menjelaskan bahwa emosi marah yang dipicu oleh retorika penuh kebencian ini secara otomatis mengaktifkan skema agresi dalam ingatan individu. Hal ini menjelaskan mengapa seorang pendukung fanatik dapat melakukan tindakan kekerasan tanpa adanya perintah langsung; mereka hanya "merespons" narasi krisis yang telah ditanamkan ke dalam kesadaran mereka secara berulang-ulang melalui media sosial dan pidato politik.

Implikasi dari mentalitas keputungan ini adalah hilangnya ruang tengah dalam politik. Moderasi dianggap sebagai pengkhianatan, dan kompromi dipandang sebagai kelemahan. Haryanto (2021) mencatat bahwa polarisasi ini merusak rasa aman kolektif karena masyarakat terbelah ke dalam faksi-faksi yang saling mencurigai. Ketika diskursus publik didominasi oleh bahasa perang dan dehumanisasi, institusi demokrasi kehilangan kemampuannya untuk berfungsi sebagai penengah konflik. Akibatnya, kekerasan bersenjata atau fisik menjadi akhir yang tragis namun terprediksi dari sebuah rantai komunikasi yang dimulai dari mimbar-mimbar politik yang menghasut. Penyelamatan demokrasi, oleh karena itu, harus dimulai dengan pengembalian martabat manusia dalam bahasa politik dan pembongkaran narasi krisis palsu yang menjadi akar dari stochastic terrorism.

B. Stochastic Terrorism: Membedah Mekanisme "Kekerasan Tanpa Perintah"

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian kepustakaan ini adalah validasi model stochastic terrorism sebagai kerangka kerja analitis utama dalam menjelaskan fenomena kekerasan politik modern. Konsep ini menawarkan cara pandang baru untuk memahami mengapa individu tertentu, yang sering kali tidak memiliki hubungan organisasional dengan kelompok teroris formal, tiba-tiba melakukan aksi kekerasan yang ekstrem. Selama ini, diskursus publik dan media arus utama cenderung terjebak dalam apa yang disebut oleh Ross (1977) sebagai fundamental attribution error. Dalam konteks kekerasan politik, bias kognitif ini bermanifestasi dalam kecenderungan untuk menyalahkan gangguan mental, patologi kepribadian, atau karakter isolasi pelaku tunggal (*lone wolf*) secara eksklusif, sambil mengabaikan pengaruh situasional dan sosiopolitik yang sangat kuat di sekelilingnya.

Namun, data dan kajian mendalam dari Hamm dan Spaaij (2017) membuktikan bahwa para pelaku kekerasan ini tidak bergerak dalam ruang hampa. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai "ujung tombak" atau instrumen akhir dari narasi ekstrem yang mereka konsumsi secara massal melalui berbagai kanal komunikasi publik. Kekerasan mereka bukan sekadar ledakan emosi pribadi, melainkan hasil dari pengkondisian ideologis yang panjang. Di sinilah letak esensi dari "terorisme stokastik": sebuah metode hasutan massal di mana target serangan dibuat menjadi "masuk akal" secara statistik, meskipun waktu, tempat, dan identitas pelaku spesifiknya tidak dapat diprediksi secara matematis.

Mekanisme internal dari fenomena ini bekerja melalui proses psikologis yang dijelaskan oleh Berkowitz (2012) dalam konsepsi cognitive-neoassociation. Teori ini menyatakan bahwa

stimulus lingkungan yang bersifat permusuhan dalam hal ini retorika politik yang penuh amarah, kebencian, dan narasi dehumanisasi mampu mengaktifkan jaringan saraf agresi dalam otak individu. Ketika seorang individu terus-menerus terpapar pada pesan bahwa kelompok tertentu adalah ancaman eksistensial, otak mereka mulai membentuk skema kognitif yang memvalidasi kekerasan sebagai respons yang adaptif dan diperlukan.

Di era digital kontemporer, mekanisme psikologis ini diamplifikasi secara masif oleh fenomena yang disebut Squire (2020) sebagai antisocial computing. Berbeda dengan cita-cita awal internet sebagai ruang demokrasi, desain teknis dan algoritma platform media sosial saat ini justru bekerja secara kontraproduktif. Algoritma dirancang untuk memaksimalkan durasi penggunaan (engagement), dan data menunjukkan bahwa konten yang memicu kemarahan, kebencian, dan ketakutan memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat daripada informasi faktual yang tenang. Munn (2020) menjelaskan proses radikalisis ini melalui konsep alt-right pipeline. Dalam jalur ini, seorang individu yang awalnya hanya mencari informasi politik moderat atau sekadar rasa komunitas, secara perlahan namun pasti akan "dicekoki" oleh konten yang semakin ekstrem melalui sistem rekomendasi otomatis yang berbasis pada kemiripan minat.

Oleh karena itu, kekerasan lone wolf dalam perspektif ini bukanlah sebuah anomali statistik atau kecelakaan sejarah, melainkan sebuah "eksekusi statistik". Hal ini merujuk pada realitas bahwa jika sebuah pesan kebencian disiarkan kepada jutaan orang, maka secara statistik dipastikan akan ada satu atau dua individu yang memiliki ketidakstabilan psikologis atau kerentanan ideologis yang cukup besar untuk menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi tindakan nyata. Elit politik, komentator publik, atau pembuat konten yang menyebarkan narasi dehumanisasi mungkin tidak pernah memberikan perintah tertulis untuk menembak, membakar, atau menyerang target tertentu. Namun, melalui pemilihan diksi yang provokatif, mereka telah menciptakan "iklim sosiopsikologis" di mana tindakan kekerasan tersebut tidak hanya menjadi mungkin, tetapi menjadi tak terelakkan.

Kecanggihan dari stochastic terrorism terletak pada kemampuan para penghasut untuk melakukan plausible deniability. Chermak dan Gruenewald (2015) menegaskan bahwa para pemimpin politik sering kali menggunakan bahasa kiasan atau retorika yang ambigu ("Seseorang harus menghentikan mereka!", "Negara kita sedang dirampas!", atau "Lawan habis-habisan!") yang diinterpretasikan sebagai instruksi operasional oleh pengikut yang fanatik. Ketika kekerasan benar-benar terjadi, para pemberi inspirasi ini dapat dengan mudah membantah keterlibatan mereka secara hukum karena tidak adanya bukti rantai komando formal. Padahal, secara moral, intelektual, dan situasional, mereka adalah arsitek utama di balik kekerasan tersebut. Mereka menabur benih kemarahan, dan ketika individu lain memanennya dengan senjata api, mereka bersembunyi di balik tameng kebebasan berpendapat.

Pada akhirnya, membedah mekanisme kekerasan tanpa perintah ini menyadarkan kita bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya datang dari kelompok teroris yang terorganisir, tetapi juga dari arus utama retorika politik yang mendehumanisasi. Jika masyarakat dan penegak hukum tetap hanya fokus pada "siapa yang menarik pelatuk" tanpa mempertanyakan "siapa yang mengisi magasin dengan kata-kata kebencian", maka siklus kekerasan stokastik ini akan terus berulang, menghancurkan fondasi keamanan kolektif dan normalisasi konflik bersenjata dalam ruang sipil.

C. Senjata Api dan Struktur Peluang Kekerasan: Ancaman Fisik bagi Demokrasi

Diskusi mengenai kekerasan politik dalam era stochastic terrorism tidak akan pernah lengkap tanpa menelaah secara kritis instrumen fisik yang digunakan untuk mengeksekusi narasi kebencian tersebut: senjata api. Dalam konteks keamanan nasional dan stabilitas sosiopolitik, senjata api bukan sekadar alat mekanis, melainkan faktor determinan yang mengubah skala dan sifat konflik. Ketersediaan senjata api berdaya rusak tinggi, khususnya senapan semi-otomatis dengan kapasitas magasin besar, telah secara radikal menggeser batas-batas destruksi dalam perselisihan politik sipil. Hubungan antara retorika dan senjata api bersifat simbiotik dan

mematikan; ketika retorika politik ekstrem memberikan "justifikasi" ideologis bagi seseorang untuk bertindak, akses mudah terhadap senjata api memberikan "kapabilitas" teknis untuk mewujudkannya. Interaksi inilah yang dalam literatur kriminologi dan studi keamanan disebut sebagai "struktur peluang kekerasan".

Struktur peluang ini mencerminkan bagaimana ketersediaan sarana kekerasan dapat menentukan apakah sebuah niat agresif akan tetap menjadi pikiran atau meledak menjadi tragedi berdarah. Penelitian seminal oleh Grossman dan Christensen (2004) mengenai psikologi pertempuran memberikan wawasan mendalam bahwa manusia, ketika berada di bawah tekanan stres politik dan emosional yang ekstrem, akan mengalami penurunan fungsi kendali kognitif secara drastis. Dalam kondisi "otak reptil" yang dipicu oleh kemarahan terhadap lawan politik, kemampuan untuk menimbang konsekuensi moral dan hukum menjadi tumpul. Keberadaan senjata api dalam situasi stres tinggi semacam ini tidak memberikan rasa aman seperti yang sering diklaim oleh para pendukung kepemilikan senjata melainkan secara empiris memicu eskalasi fatalitas. Senjata api mempersingkat jarak antara impuls kemarahan dan tindakan mematikan, sehingga konflik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui argumen atau mediasi justru berakhir dengan hilangnya nyawa.

Lebih jauh lagi, Koehler (2019) mencatat sebuah tren global yang sangat mengkhawatirkan di mana kelompok-kelompok ekstremis, terutama dari sayap kanan, mulai menormalisasi kepemilikan senjata sebagai bagian dari identitas politik mereka. Mereka membangun narasi tentang "persiapan" menghadapi perang saudara (civil war) yang mereka bayangkan akan terjadi akibat kebijakan lawan politik yang dianggap mengancam eksistensi kelompok. Normalisasi persenjataan dalam ruang publik sipil ini menciptakan iklim militerisme yang merusak tatanan masyarakat yang beradab. Di titik ini, demokrasi tidak lagi sekadar menghadapi tantangan prosedural, melainkan ancaman fisik yang eksistensial. Keberadaan senjata api yang tersebar luas di tangan individu-individu yang teradikalisasi secara politik menciptakan risiko permanen bagi siapa pun yang berani menyuarakan pendapat yang berbeda.

Demokrasi deliberatif, sebagaimana kerangka teoretis yang diusulkan oleh Habermas (1996), secara fundamental menuntut adanya ruang publik yang bebas dari segala bentuk intimidasi dan ancaman fisik. Esensi dari demokrasi adalah "kekuatan argumen terbaik", bukan "kekuatan senjata terkuat". Namun, ketika warga negara atau tokoh publik merasa bahwa menyatakan pendapat atau melakukan kritik politik akan dibalas dengan kekerasan bersenjata, maka deliberasi secara otomatis mati. Intimidasi bersenjata menciptakan apa yang disebut sebagai chilling effect atau keheningan yang dipaksakan. Ini adalah kondisi di mana individu melakukan sensor mandiri (self-censorship) karena takut akan keselamatan jiwanya. Kondisi ini merupakan bentuk kematian perlahan bagi norma-norma demokrasi; sebuah masyarakat mungkin masih memiliki institusi pemilu, namun jika diskusi publiknya dikendalikan oleh ketakutan terhadap senjata, maka esensi kebebasannya telah hilang.

Normalisasi senjata dalam retorika dan realitas politik sipil adalah pengakuan implisit bahwa kekuasaan tidak lagi bersumber dari legitimasi suara rakyat atau konsensus rasional, melainkan kembali ke hukum rimba yang mengandalkan "moncong senapan". Hal ini menghancurkan kontrak sosial yang mendasari negara modern, di mana monopoli atas kekerasan fisik seharusnya hanya dimiliki secara sah oleh negara untuk melindungi warga negara, bukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk menekan lawan politiknya. Gunn dan Lucaites (2010) menegaskan bahwa retorika kekerasan bersenjata adalah antitesis dari kewarganegaraan yang demokratis.

Sebagai kesimpulan dari poin ini, data literatur menunjukkan bahwa membiarkan persenjataan liar bersinggungan dengan retorika politik yang mendehumanisasi adalah resep bagi disintegrasi sosial. Untuk menjaga keberlangsungan demokrasi, diperlukan tindakan tegas bukan hanya pada aspek pengendalian senjata (gun control), tetapi juga pada dekontaminasi ruang publik dari narasi yang mengagungkan kekerasan sebagai solusi politik. Demokrasi hanya akan tetap hidup selama pena dan lisan memiliki bobot yang lebih besar daripada peluru. Upaya

memulihkan norma damai dalam resolusi konflik harus menjadi prioritas utama untuk membongkar struktur peluang kekerasan yang saat ini mengancam fondasi kehidupan bernegara di era digital yang penuh gejolak.

D. Manipulasi Informasi, Disinformasi, dan Erosi Fondasi Epistemik

Era post-truth telah menghancurkan landasan fakta yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam perdebatan politik yang sehat. Dalam kondisi ini, kebenaran objektif sering kali kalah oleh daya tarik emosional dan keyakinan personal. Marwick dan Lewis (2017) mengungkap bagaimana teknik manipulasi media digunakan secara sistematis oleh aktor-aktor tertentu untuk menciptakan "realitas alternatif" di benak publik. Disinformasi, dalam konteks ini, tidak boleh dipahami sekadar sebagai kebohongan atau hoaks biasa; ia merupakan upaya struktural untuk merusak kemampuan kognitif masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi. Ketika masyarakat kehilangan standar kebenaran yang sama, maka dialog rasional menjadi mustahil untuk dilakukan.

Dampaknya semakin destruktif karena didukung oleh infrastruktur digital yang mengisolasi individu. Susilo (2020) dan Sunstein (2017) menunjukkan bahwa masyarakat saat ini terperangkap dalam echo chambers (ruang gema), di mana algoritma media sosial hanya menyajikan informasi yang memvalidasi bias dan kebencian mereka. Di dalam ruang tertutup ini, narasi mendehumanisasi terhadap lawan politik tidak pernah dibantah, melainkan terus diamplifikasi hingga dianggap sebagai kebenaran absolut. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang terfragmentasi secara epistemik, di mana setiap kelompok hidup dalam dunianya sendiri dengan "fakta-fakta" mereka sendiri.

Di Indonesia, fenomena erosi epistemik ini diperparah oleh penggunaan jaringan ideologi yang mengeksploitasi identitas rasial dan agama (Bliuc et al., 2018). Sentimen "kami versus mereka" tidak lagi hanya bersifat politis-ideologis, tetapi telah masuk ke wilayah primordial yang sangat sensitif dan emosional. Penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam kampanye disinformasi bertujuan untuk menciptakan keterbelahan yang permanen. Ketika fondasi epistemik sebuah bangsa hancur di mana warga tidak lagi setuju pada fakta dasar mengenai siapa yang mengancam dan siapa yang melindungi maka resolusi konflik secara damai melalui institusi demokrasi menjadi mustahil.

Ketidakkampuan kolektif untuk menyepakati realitas dasar ini merupakan ancaman paling serius bagi keberlangsungan demokrasi. Fadhlurrohman (2023) memperingatkan bahwa tanpa adanya intervensi serius terhadap ekosistem informasi, populisme ekstrem akan terus menggerogoti institusi demokrasi dari dalam. Dalam perang informasi ini, hoaks dan disinformasi berfungsi sebagai "peluru utama" yang tidak menghancurkan fisik secara langsung, namun menghancurkan kepercayaan publik (*social trust*) yang merupakan perekat demokrasi. Erosi kepercayaan ini pada akhirnya menyediakan pembenaran bagi munculnya kekerasan stochastic terrorism, karena individu yang teradikalisasi merasa bertindak berdasarkan "fakta" (yang sebenarnya disinformasi) bahwa kelompok mereka sedang diserang. Oleh karena itu, pemulihan fondasi epistemik melalui literasi digital kritis dan jurnalisme yang kredibel bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan syarat mutlak bagi pertahanan demokrasi di era digital.

E. Mitigasi: Membangun Struktur Pendinginan dan Etika Diskursus

Sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan yang dipicu oleh retorika mendehumanisasi, artikel ini mengusulkan urgensi pembangunan cooling structures atau struktur pendinginan politik. Struktur ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan desain interaksi sosial yang sengaja diciptakan untuk menurunkan ketegangan antar-kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial lintas perbedaan (*cross-cutting affiliations*) adalah penawar paling mujarab bagi proses dehumanisasi. Ketika individu dari kubu politik yang berbeda berinteraksi secara personal dan mendalam, narasi "monster" atau penggambaran lawan politik sebagai ancaman eksistensial menjadi sulit dipertahankan karena adanya validasi kemanusiaan secara langsung.

Dalam konteks ini, elite politik memegang tanggung jawab normatif yang sangat besar. Maarif (2018) menekankan bahwa etika komunikasi politik harus dikembalikan ke khittah ruang publik yang beradab. Pemulihan etika ini dimulai dengan komitmen eksplisit untuk menolak bahasa dehumanisasi dan mengutuk segala bentuk kekerasan tanpa syarat, tanpa memandang latar belakang politik pelakunya. Sikap tegas elit berfungsi sebagai sinyal pendinginan bagi massa akar rumput yang cenderung meniru pola komunikasi pemimpin mereka. Jika elit terus melakukan normalisasi terhadap kebencian, maka spiral kekerasan akan terus berlanjut.

Secara teknis dan struktural, upaya mitigasi harus menyentuh akar permasalahan dalam ekosistem media. Regulasi media sosial perlu didorong untuk membongkar algoritma kebencian yang selama ini menguntungkan konten-konten provokatif. Haryanto (2021) dan Nurhasanah (2019) sepakat bahwa literasi digital tidak boleh lagi hanya berfokus pada kemampuan teknis mengoperasikan gawai, melainkan harus menyorot kemampuan kognitif kritis warga dalam mendeteksi manipulasi emosional dan propaganda terselubung. Masyarakat yang literat secara digital akan memiliki imunitas terhadap stochastic terrorism karena mampu membedakan antara kritik politik yang sah dan hasutan yang mendehumanisasi.

Terakhir, integrasi kebijakan antara keamanan nasional dan perlindungan ruang publik bersifat imperatif. Rakhmani (2019) menekankan perlunya strategi "de-mainstreaming" ekstremisme, yaitu upaya sistematis untuk menarik kembali wacana ekstrem dan radikal dari pusat panggung politik ke wilayah pinggiran yang tidak memiliki daya rusak massal. Hal ini menuntut keberanian institusi demokrasi untuk menegakkan aturan main yang menghormati martabat manusia sebagai subjek rasional, sesuai prinsip demokrasi deliberatif Habermas (1996). Hanya dengan memulihkan rasa kemanusiaan dalam setiap diskursus politik, demokrasi dapat diselamatkan dari ancaman disintegrasi dan spiral kekerasan stochastic terrorism yang mematikan.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis mendalam terhadap fenomena retorika politik, stochastic terrorism, dan ekosistem media, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap demokrasi kontemporer bersifat sistemik dan struktural. Transformasi retorika politik dari sekadar persuasi menjadi instrumen dehumanisasi telah menciptakan "mentalitas kepungan" yang merusak rasionalitas publik. Proses ini bukan sekadar fenomena linguistik, melainkan mekanisme psikologis yang meruntuhkan hambatan moral individu untuk melakukan kekerasan. Melalui ekosistem media yang algoritmik, narasi kebencian ini diamplifikasi menjadi stochastic terrorism, di mana kekerasan politik oleh aktor tunggal (*lone wolf*) menjadi hasil akhir yang dapat dipastikan secara statistik meskipun tidak dapat diprediksi secara spesifik.

Ketersediaan senjata api berdaya tinggi memperburuk situasi ini dengan menyediakan kapabilitas fisik bagi individu yang telah teradikalisasi secara ideologis. Konvergensi antara hasutan massal dan akses senjata menciptakan "struktur peluang kekerasan" yang secara langsung mengancam norma demokrasi deliberatif. Keamanan demokrasi tidak lagi hanya bergantung pada stabilitas institusi formal, tetapi pada pemulihan fondasi epistemik masyarakat yang saat ini terdistorsi oleh disinformasi dan manipulasi informasi.

Sebagai langkah mitigasi, diperlukan pembangunan cooling structures yang melibatkan komitmen etik elit politik, reformasi algoritma media sosial, serta penguatan literasi digital kritis. Upaya "de-mainstreaming" ekstremisme dan pengembalian martabat manusia dalam diskursus politik menjadi syarat mutlak untuk memutus spiral kekerasan. Tanpa intervensi komprehensif terhadap rantai pasokan kebencian ini, demokrasi akan terus menghadapi ancaman disintegrasi fisik dan simbolik yang mematikan.

BIBLIOGRAPHY

- Berger, J. M. (2018). *Extremism*. MIT Press.
- Berkowitz, L. (2012). A different view of anger: The cognitive-neoassociation conception of the relation of anger to aggression. *Aggressive Behavior*, 38(4), 322–333.
- Bliuc, A. M., Betts, J., Vergani, M., Iqbal, M., & Dunn, K. (2018). Online networks of racial ideology: A subdivision of the ideology of white supremacy. *Language, Identity & Education*, 17(2), 1–15.
- Chermak, S., & Gruenewald, J. (2015). Laying a foundation for the study of terrorism. *Terrorism and Political Violence*, 27(3), 407–417.
- Fadhlorrohan, M. (2023). Ancaman populisme terhadap institusi demokrasi: Studi kasus kekerasan politik. *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola*, 5(1).
- Grossman, D., & Christensen, L. W. (2004). *On combat: The psychology and physiology of deadly conflict in war and in peace*. Warrior Science Publications.
- Gunn, J., & Lucaites, J. L. (2010). The rhetoric of political violence. *Rhetoric & Public Affairs*, 13(1), 1–7.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Polity Press.
- Hamm, M. S., & Spaaij, R. (2017). *The age of lone wolf terrorism*. Columbia University Press.
- Haryanto, S. (2021). Retorika politik dan polarisasi masyarakat di era media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISP)*, 25(1).
- Hassan, S. (2015). *Combating cult mind control*. Park Street Press.
- Koehler, D. (2019). *Violence and terrorism from the far-right: Policy options to counter an elusive threat*. ICCT Policy Brief.
- Lifton, R. J. (1989). *Thought reform and the psychology of totalism*. University of North Carolina Press.
- Maarif, S. (2018). Etika komunikasi politik di era post-truth. *Jurnal Etika Politik*, 2(1).
- Marwick, A. E., & Lewis, B. (2017). *Media manipulation and disinformation online*. Data & Society Research Institute.
- Mietzner, M. (2020). Populism, democratic decline and the role of the middle class in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 50(3), 418–440.
- Munn, L. (2020). Alt-right pipeline: Individual journey to extremism online. *First Monday*, 25(6).
- Nurhasanah, S. (2019). Radikalisme online dan ancaman terhadap ruang publik demokratis. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(2).
- Pratama, B. A. (2022). Dehumanisasi dalam kontestasi politik: Analisis wacana kritis di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK)*, 19(1).
- Rakhmani, I. (2019). Mainstreaming extremism: The role of media and political discourse. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2).
- Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings. Dalam L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 10, hlm. 173–220). Academic Press.
- Squire, M. (2020). *Antisocial computing: Explaining public extremism and private radicalization*. IEEE Symposium on Security and Privacy.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Susilo, D. (2020). Ekosistem media dan penyebaran hoaks: Tantangan bagi demokrasi deliberatif. *Jurnal Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(1).
- Wahyuni, H. I. (2018). Kekerasan simbolik dalam retorika politik kontemporer. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada*, 15(2).
- Wojcieszak, M. (2009). 'Carry on carried away': Is optimization of cognitive outcomes a dream

or a reality? *Journal of Communication*, 59(1), 86–103.

Zulkarnain, I. (2021). Terorisme 'lone wolf' dan radikalisisi individu di Indonesia: Perspektif psikologi sosial. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1).